

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah salah satu negara yang memiliki tempat wisata beragam di dunia. Pariwisata di Indonesia sudah mengalami peningkatan, saat ini tujuan pengembangan pariwisata bukan hanya untuk kegiatan rekreasi saja melainkan untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Pariwisata merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan manusia dengan mendatangi tempat tertentu, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam kegiatan rekreasi (Wisnawa dalam Raras, 2019). Sektor pariwisata ini sangat menjajikan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990, pengembangan pariwisata bertujuan antara lain untuk mendorong penggunaan produk nasional serta membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan bekerja bagi masyarakat. Berdasarkan hasil statistik Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 4,80%. Persentase tersebut menunjukkan kenaikan pada setiap tahunnya yakni 4,11% pada 2017 dan 4,5% pada 2018 (Kemenpar, 2019).

Peningkatan capaian sektor pariwisata nasional pada tahun 2017-2019 dapat meningkat secara stabil dan relevan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1**Target dan Capaian Sektor Pariwisata Nasional Tahun 2017-2019**

INDIKATOR	2017			2018			2019		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Kontribusi Pada PDB Nasional	5.00 %	5.00 %	100 %	5.25 %	5.25 %	100 %	5.50 %	*4.8 %	87.27 %
Devisa (Triliun Rp)	200	202.1 3	101.0 7%	223	224	100.4 5%	280	*197	70.36 %
Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang)	12	12.6	105.0 0%	126	127	100.7 9%	13	*12.9	99.23 %
Indeks Daya Saing (wef)	#40	#42	95.24 %	-	-	-	30	40	75.00 %
Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan)	15	14.04	93.60 %	17	15.8 1	93.00 %	20	16.1	80.50 %
Wisatawan Nusantara (Juta Kunjungan)	265	270.8 2	102.2 0%	270	203. 5	112.4 1%	275	*290	105.4 5%

Sumber: Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024

Keterangan:

- # = Indeks daya saing hanya dilakukan 2 tahun sekali
- * = Angka proyeksi sementara berdasarkan RKP 2021
- T: Target; R: Realisasi; C: Capaian

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa capaian sektor pariwisata nasional pada tahun 2019 cenderung menurun dari tahun 2017 dan 2018. Dari enam indikator, hampir semua indikator tidak dapat mencapai target pariwisata nasional yang telah ditetapkan. Kontribusi pariwisata nasional pada PDB

Nasional pada tahun 2019 hanya mencapai 87,27% yang menurun pada dua tahun sebelumnya yang dapat memenuhi semua target dan mencapai 100%. Untuk indikator devisa, capaian pariwisata nasional tahun 2019 sebesar 70,36%, hal ini sangat menurun dari dua tahun sebelumnya yang dapat mencapai 101% dan 100,4% di tahun 2018 dan 2019. Jumlah tenaga kerja mencapai 99,23% pada tahun 2019, meskipun menurun dari dua tahun sebelumnya namun capaian ini hampir memenuhi seluruh target yang direncanakan. Setiap dua tahun sekali, dilakukan Indeks daya saing yaitu pada tahun 2017 mencapai 95,24% dan menurun pada tahun 2019 yang hanya mencapai 75% dari target. Pada indikator wisatawan mancanegara dari tahun 2017-2019 tidak pernah mencapai 100% dan menurun setiap tahunnya. Satu-satunya indikator yang mencapai target secara maksimal ialah indikator wisatawan nusantara. Pada tahun 2019 indikator ini dapat mencapai 105,4%, meskipun menurun dari tahun 2018 namun capaian ini merupakan langkah yang bagus untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan indikator yang belum maksimal dapat lebih ditingkatkan.

Jumlah wisatawan nusantara di masing-masing daerah berbeda-beda. Indonesia yang memiliki 34 provinsi memiliki keunikan masing-masing pada pariwisatanya. Jawa Tengah merupakan destinasi wisata dengan peringkat ke 3 jumlah kunjungan wisata yang paling sering dikunjungi. Berikut ini merupakan tabel jumlah perjalanan wisatawan nusantara tahun 2017-2019:

Tabel 1.2**Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang), 2017-2019**

Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang)		
	2017	2018	2019
Aceh	4 410 969	6 518 831	6 677 350
Sumatera Utara	9 364 706	10 345 256	10 270 955
Sumatera Barat	5 483 028	6 402 187	6 608 377
Riau	5 149 936	5 552 920	4 524 315
Jambi	1 906 593	2 242 802	1 862 760
Sumatera Selatan	5 948 669	6 137 095	5 005 476
Bengkulu	1 950 249	2 018 556	2 049 220
Lampung	6 002 487	6 881 006	6 210 447
Kep. Bangka Belitung	3 831 465	5 197 635	8 835 507
Kep. Riau	3 805 645	4 611 718	7 904 297
Dki Jakarta	24 840 040	24 967 080	21 683 578
Jawa Barat	43 779 162	53 203 387	49 247 753
Jawa Tengah	41 182 591	43 110 598	39 211 023
Di Yogyakarta	6 498 739	7 858 137	7 718 353
Jawa Timur	43 689 273	53 244 287	52 081 723
Banten	9 551 703	13 275 125	11 390 512
Bali	8 143 614	6 621 617	6 336 447
Nusa Tenggara Barat	4 134 434	3 192 581	2 065 701
Nusa Tenggara Timur	2 856 531	2 947 381	2 865 432
Kalimantan Barat	2 996 380	3 257 024	2 924 941
Kalimantan Tengah	2 398 510	2 745 542	2 082 520
Kalimantan Selatan	4 300 487	4 520 927	3 344 620
Kalimantan Timur	3 205 261	2 613 107	1 823 000
Kalimantan Utara	728 373	634 477	686 336
Sulawesi Utara	2 759 200	4 313 069	3 250 699
Sulawesi Tengah	3 427 266	2 260 800	1 850 710
Sulawesi Selatan	8 812 173	9 616 232	8 045 434
Sulawesi Tenggara	2 963 742	3 370 736	2 028 472
Gorontalo	1 206 547	938 557	764 717
Sulawesi Barat	2 119 320	941 944	779 228
Maluku	863 592	1 206 288	754 528
Maluku Utara	513 206	615 624	622 143
Papua Barat	581 002	686 836	622 840
Papua	1 117 110	1 354 526	796 440
Indonesia	270 822 003	303 403 888	282 925 854

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (Kementerian Pariwisata), 2019

Berdasarkan tabel 1.2, jumlah perjalanan wisatawan nusantara dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 32,5 ribu orang secara keseluruhan. Namun pada tahun 2019 menurun sebesar 20,4 ribu orang. Jawa tengah merupakan provinsi dengan peringkat ke 3 dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara tahun 2017-2019 terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Tengah juga mengalami naik turun, yaitu pada tahun 2018 naik sebesar 19,2 ribu orang dan turun sebesar 38,9 ribu orang. Meskipun menurun pada tahun 2019 namun daya tarik wisata di Jawa Tengah masih digemari masyarakat. Setiap kota/kabupaten yang berada di Jawa Tengah memiliki daya tarik wisatanya sendiri. Berikut ini merupakan tabel banyaknya Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017-2019:

Tabel 1.3**Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017-2019**

Kabupaten/Kota		2017	2018	2019
Kabupaten				
1.	Cilacap	23	22	25
2.	Banyumas	24	24	35
3.	Purbalingga	13	30	47
4.	Banjarnegara	15	15	21
5.	Kebumen	9	20	31
6.	Purworejo	34	37	52
7.	Wonosobo	8	8	8
8.	Magelang	23	28	68
9.	Boyolali	47	53	53
10.	Klaten	15	15	27
11.	Sukoharjo	2	3	4
12.	Wonogiri	8	8	9
13.	Karanganyar	18	18	19
14.	Sragen	34	50	50
15.	Grobogan	14	17	20
16.	Blora	20	22	26
17.	Rembang	20	20	21
18.	Pati	24	24	26
19.	Kudus	39	39	39
20.	Jepara	36	39	40
21.	Demak	8	8	5
22.	Semarang	41	41	44
23.	Temanggung	6	6	13
24.	Kendal	15	27	40
25.	Batang	8	16	38
26.	Pekalongan	28	28	32
27.	Pemalang	16	16	17
28.	Tegal	4	4	4
29.	Brebes	13	17	17
Kota				
1.	Magelang	10	11	12
2.	Surakarta	9	24	24
3.	Salatiga	6	5	5
4.	Semarang	41	45	34
5.	Pekalongan	6	6	7
6.	Tegal	4	4	4
Jumlah		641	750	917

Sumber: Badan Pusat Statistik (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah), 2019

Dapat dilihat pada tabel 1.3, bahwa pada tahun 2017-2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah daya tarik wisata di Jawa Tengah. Pada tahun 2017 jumlah daya tarik wisata 641 dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 750. Pada tahun 2019 juga meningkat sebanyak 167 daya tarik wisata di Jawa Tengah. Pada wilayah kabupaten, kabupaten Semarang memiliki daya tarik wisata tertinggi yaitu sebesar 44 pada tahun 2019 begitu pula pada wilayah kota, kota Semarang memiliki daya tarik wisata tertinggi yaitu sebesar 34 pada tahun 2019.

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pariwisata daerah. Tujuan wisata ke Kota Semarang juga beragam, diantaranya wisata budaya, wisata alam, wisata pertanian (agrowisata), hingga wisata religi. Bahkan kota Semarang pada tahun 2020, mendapatkan penghargaan di ajang *ASEAN Tourism Forum (ATF) 2020*, yang dilaksanakan di Brunei Darussalam sebagai salah satu kota dengan destinasi wisata terbersih di Asia Tenggara. Kota Semarang dianugerahi Penghargaan Kota Wisata Bersih 2020 atau *Clean Tourist City Award 2020*. Penghargaan tersebut diberikan oleh Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) untuk Kota Semarang selama dua tahun hingga tahun 2022 (Aditya, 2020).

Daya tarik wisata di Kota Semarang meningkat pada tiap tahunnya. Jumlah obyek wisata mulai dari tahun 2017-2019 bertambah sebanyak 57 obyek wisata yang terdiri atas daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4

Jumlah Daya Tarik Wisata di Kota Semarang Tahun 2017-2019

TAHUN	ALAM	BUDAYA	BUATAN	JUMLAH
2019	27	35	57	119
2018	17	25	47	89
2017	12	25	25	62

Sumber: Neraca Satelit Pariwisata Daerah Kota Semarang, 2020.

Berdasarkan tabel 1.4, peningkatan jumlah daya tarik wisata di Kota Semarang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah daya tarik wisata di Kota Semarang berjumlah 62 dan meningkat di tahun 2019 sejumlah 119. Artinya terdapat peningkatan sebesar 57 daya tarik wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Peningkatan daya tarik wisata ini jika dilihat dari tahun 2017 dan 2019, wisata alam dan wisata buatan mengalami peningkatan hingga dua kali lipat yaitu pada tahun 2017 daya tarik wisata alam di Kota Semarang sebesar 12 dan meningkat di tahun 2019 sebesar 27. Hal yang sama juga dapat dilihat dari daya tarik wisata buatan yang pada tahun 2017 sebesar 25 dan pada tahun 2019 sebesar 57. Tetapi pada daya tarik wisata budaya dari tahun 2017 ke 2018 tidak ada peningkatan dan tetap di angka yang sama yaitu 25.

Peningkatan daya tarik obyek wisata di Kota Semarang juga meningkatkan pula jumlah kunjungan wisata ke Kota Semarang. Pada tahun 2017-2019 peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Daya Tarik Wisata Kota Semarang
Tahun 2017-2019**

KETERANGAN	Tahun		
	2017	2018	2019
Wisata Budaya	1.371.709 orang	1.452.451 orang	1.638.167 orang
Wisata Bahari	1.071.728 orang	1.164.635 orang	1.313.550 orang
Wisata Alam	1.108.028 orang	-	1.357.179 orang
Wisata Sejarah	1.371.709 orang	1.452.451 orang	1.638.167 orang
Wisata Religi	489.789 orang	-	599.921 orang
Wisata Pendidikan	661 orang	718 orang	809 orang
Wisata Kuliner	1.934.500 orang	2.110.153 orang	2.379.966 orang
Wisata Belanja	4.630.080 orang	5.050.491 orang	5.696.270 orang
Wisata Buatan	977.707 orang	1.062.701 orang	1.198.582 orang

Sumber: Neraca Satelit Pariwisata Daerah Kota Semarang, 2020

Berdasarkan tabel 1.5, Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Daya Tarik Wisata Kota Semarang Tahun 2017-2019 selalu meningkat tiap tahunnya. Jumlah wisatawan tertinggi yaitu pada kunjungan wisata ke wisata belanja. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan ke wisata belanja mencapai 4.630.080 orang, tahun 2018 sebesar 5.050.491 orang, dan tahun 2019 sebesar 5.696.270 orang. Terdapat peningkatan sebesar 400.000-600.000 orang tiap tahunnya. Sedangkan jumlah wisatawan terendah yaitu pada kunjungan wisata religi. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan hanya sebesar 489.789 orang dan tahun 2019 sebesar 599.921 orang. Jumlah wisatawan yang mengunjungi wisata religi sangat berbanding terbalik dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi wisata belanja. Artinya wisatawan lebih tertarik untuk berkunjung ke obyek

wisata belanja saat berada di Kota Semarang daripada mengunjungi obyek wisata religi.

“Ayo Wisata ke Kota Semarang” merupakan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang harapannya dapat menarik minat masyarakat baik lokal maupun internasional untuk berwisata ke Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dinas yang mengurus segala kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan bersama lima (5) UPTD yaitu UPTD Taman Marga Satwa, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, UPTD Kreo dan Agrowisata, UPTD Tinjomoyo, dan UPTD Taman Budaya Raden Saleh. Kelima UPTD tersebut langsung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Semarang memiliki target masing-masing dalam upaya meningkatkan kunjungan ke lokasi wisata di setiap UPTD. Dari kelima UPTD yang berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, satu-satunya UPTD yang memiliki daya tarik wisata seni dan budaya ialah UPTD Taman Budaya Raden Saleh. UPTD TBRS mengelola pariwisata yang berhubungan dengan seni dan budaya dikarenakan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) itu sendiri sebagai sentral kesenian dan kebudayaan, menjadi salah satu tujuan wisata yang menawarkan wisata budaya dengan menampilkan pertunjukan wayang, pertunjukan teater, pertunjukan musik, hingga pameran seni lukis.

Menurut Peraturan Walikota nomor 123 tahun 2016, UPTD Taman Budaya Raden Saleh bertugas melaksanakan kegiatan teknis yakni mengelola dan memberikan pelayanan kegiatan Taman Budaya Raden Saleh. Pengelolaan dan pemberian pelayanan yang dimaksud seperti pelaksanaan kebersihan, ketertiban, serta keamanan di TBRS. Taman Budaya Raden Saleh juga memiliki banyak gedung di dalamnya yaitu Gedung Kesenian Ki Narto Sabdho, Kantor Pengelola TBRS, Gedung Serba Guna, dan Kantor Dewan Kesenian Semarang (Dekase).

UPTD Taman Budaya Raden Saleh memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila ada yang ingin menyewa gedung pertemuan, gedung serbaguna, open teater, ataupun peminjaman pendopo. Gedung-gedung ini biasanya disewakan untuk konser musik, pertunjukan teater, kegiatan lomba, dan lain sebagainya. Selain gedung, di dalam TBRS terdapat beberapa kios warung makan yang dapat digunakan untuk tempat beristirahat atau bersantai. Penyewaan gedung dan beberapa kios ini menjadi pendapatan retribusi bagi pihak TBRS. Namun seperti yang kita telah ketahui, bahwa awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia pertama kali mengumumkan adanya kasus COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Kasus COVID-19 ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka 1 juta lebih orang yang teridentifikasi terjangkit virus corona. Di kota Semarang sendiri sudah 33.000 lebih kasus yang teridentifikasi. Pandemi COVID-19 saat ini berdampak pada

seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini pihak UPTD Taman Budaya Raden Saleh juga salah satu sektor yang merasakan dampak adanya pandemi.

Dampak yang dirasakan UPTD TBRS akibat situasi pandemi COVID-19 tidak lain adalah adanya penurunan jumlah pendapatan retribusi kios dan sewa gedung pada tahun 2020. Meskipun terdapat peningkatan jumlah pendapatan retribusi dari tahun 2018 ke tahun 2019, yang dikarenakan pada tahun 2018 hanya terdapat 9 pemilik kios di TBRS dan pada tahun 2019 menjadi 12 pemilik kios tetapi menurun pada tahun 2020 khususnya mulai bulan Maret-Juli. Bahkan pada bulan Mei-Juli tidak ada pembayaran retribusi kios. Hal ini dikarenakan pada awal pandemi di kota Semarang, seluruh tempat wisata ditutup begitu juga kios yang berada di dalam TBRS. Pemilik kios ini setiap tahunnya memberikan retribusi sebesar Rp 200.000,00. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan tabel jumlah retribusi kios tahun 2018-2020:

Tabel 1.6**Retribusi Kios TBRS per bulan Tahun 2018-2020**

NO	BULAN	RETRIBUSI (Rp)		
		2018	2019	2020
1	Januari	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	Februari	1.800.000	2.400.000	2.000.000
3	Maret	1.800.000	2.400.000	400.000
4	April	1.800.000	2.400.000	200.000
5	Mei	1.800.000	2.400.000	-
6	Juni	1.800.000	2.400.000	-
7	Juli	1.800.000	2.400.000	-
8	Agustus	1.800.000	2.400.000	2.200.000
9	Semptember	1.800.000	2.400.000	2.200.000
10	Oktober	1.800.000	2.000.000	1.800.000
11	November	1.800.000	2.000.000	2.200.000
12	Desember	1.800.000	2.000.000	3.800.000
JUMLAH		21.600.000	27.000.000	16.600.000

Sumber: UPTD Taman Budaya Raden Saleh, 2021

Berdasarkan tabel 1.6, pendapatan retribusi kios pada tahun 2019 meningkat, hal ini dikarenakan adanya tambahan jumlah pemilik kios, yang awalnya pada tahun 2018 terdapt 9 kios menjadi 12 kios pada tahun 2019. Peningkatan jumlah pendapatan retribusi kios menunjukkan pada tahun 2018 jumlah pendapatan retribusi kios sebesar Rp 21.600.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 27.000.000, yang artinya terdapat peningkatan jumlah pendapatan sebesar Rp 5.400.000 dalam satu tahun. Namun, pada tahun 2020 jumlah pendapatan retribusi kios menurun sebesar Rp 10.400.000. Di Tahun 2020, pihak UPTD TBRS hanya mendapatkan retribusi sebesar Rp 16.600.000

dikarenakan pada bulan Mei-Juli tidak ada pemasukan dari pemilik kios sehingga pendapatan retribusi kios pada bulan itu Rp 0. Pendapatan retribusi kios menurun karena adanya kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Semarang dengan cara menutup seluruh aktivitas di Taman Budaya Raden Saleh termasuk penutupan kios.

Selain retribusi kios, Taman Budaya Raden Saleh juga mendapatkan pendapat retribusi dari penyewaan gedung pertemuan. Penyewaan gedung ini digunakan untuk pementasan teater, audisi musik, pertunjukan wayang, pertunjukan musik, dan lain sebagainya. Tarif retribusi penyewaan gedung pertemuan berkisar Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00. Untuk lebih jelasnya, jumlah retribusi penyewaan gedung tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7**Retribusi Sewa Gedung Pertemuan per bulan Tahun 2018-2020**

NO	BULAN	RETRIBUSI (Rp)		
		2018	2019	2020
1	Januari	9.000.000	16.500.000	10.400.000
2	Februari	10.500.000	19.400.000	13.500.000
3	Maret	10.500.000	16.500.000	5.400.000
4	April	4.500.000	13.900.000	-
5	Mei	4.500.000	3.800.000	-
6	Juni	1.500.000	11.700.000	-
7	Juli	7.500.000	8.200.000	-
8	Agustus	4.500.000	11.400.000	-
9	September	6.000.000	17.200.000	-
10	Oktober	4.500.000	15.700.000	-
11	November	12.500.000	-	1.500.000
12	Desember	16.000.000	-	-
JUMLAH		91.500.000	134.300.000	30.800.000

Sumber: UPTD Taman Budaya Raden Saleh, 2021

Berdasarkan tabel 1.7, pendapatan retribusi sewa gedung pada tahun 2020 juga mengalami penurunan drastis sama halnya dengan pendapatan retribusi kios. Pada tahun 2018 pendapatan retribusi sewa gedung sebesar Rp 91.500.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 134.300.000, hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan retribusi sewa gedung sebesar Rp 42.800.000. Namun pada tahun 2020, jumlah pendapatan retribusi sewa gedung sangat menurun drastis dan hanya mendapatkan sebesar Rp 30.800.000 saja. Dapat dilihat pada tabel 1.7 bahwa penyewaan gedung hanya berjalan 3 bulan pertama dan pada bulan November. Sangat berbeda sekali dengan sebelum pandemi tahun 2018

dari bulan Januari-Desember terdapat pendapatan retribusi sewa gedung. Jumlah pendapatan retribusi penyewaan gedung dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada jumlah penyewa setiap bulan yang akan menggunakan fasilitas gedung di Taman Budaya Raden Saleh.

Penurunan pendapatan retribusi kios dan sewa gedung pada UPTD TBRS dikarenakan diterapkannya Peraturan walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang menegaskan bahwa adanya pembatasan penyelenggaraan tempat wisata, berkaitan dengan jam operasional maupun jumlah pengunjung.

Berlandaskan perwal ini maka pihak UPTD TBRS harus mematuhi peraturan tersebut dengan mengurangi jam operasional dan jumlah pengunjung, yang artinya berdampak pada kegiatan yang dilaksanakan di TBRS. Pada tahun 2020, jumlah kegiatan yang dilaksanakan di TBRS sangatlah berkurang dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pengurangan jumlah kegiatan tiap bulan dapat dilihat mulai dari tahun 2018-2020 pada tabel berikut:

Tabel 1.8

Kegiatan di TBRS per bulan Tahun 2018-2020

NO	BULAN	PELAKSANAAN KEGIATAN TBRS		
		2018	2019	2020
1	Januari	8	9	6
2	Februari	9	10	16
3	Maret	12	17	16
4	April	16	26	12
5	Mei	10	9	3
6	Juni	5	18	9
7	Juli	10	16	3
8	Agustus	9	19	5
9	September	10	16	3
10	Oktober	7	12	2
11	November	14	15	2
12	Desember	17	16	-
JUMLAH		127	183	77

Sumber: UPTD Taman Budaya Raden Saleh, 2021

Dilihat dari tabel 1.8, bahwa ada penurunan yang cukup banyak pada pelaksanaan kegiatan di Taman Budaya Raden Saleh pada tahun 2020, khususnya pada bulan April ke bulan Mei sangat turun drastis dari 12 kegiatan menjadi 3 kegiatan. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan yang awalnya sudah direncanakan tetapi gagal dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19 contohnya pertunjukan wayang, pameran seni, dan pentas teater. Pihak UPTD TBRS juga masih belum bisa mengatasi bagaimana agar kegiatan tetap berjalan meskipun ada halangan pandemi.

Sebelum adanya pandemi COVID-19, kinerja organisasi UPTD TBRS sudah cukup baik yang dapat dilihat dari jumlah pendapatan retribusi kios, retribusi sewa gedung, dan kegiatan di TBRS terus mengalami peningkatan setiap tahun. Suasana kerja serta kepemimpinan menjadi faktor yang meningkatkan kinerja organisasi UPTD TBRS saat sebelum pandemi COVID-19. Seluruh pegawai UPTD TBRS bekerjasama dalam meningkatkan performa dalam mengelola seluruh kegiatan yang berada di Taman Budaya Raden Saleh, baik kegiatan kesenian, kebudayaan, maupun kegiatan lainnya.

Namun, menurut hasil pra-survey, peneliti menemukan bahwa selama adanya pandemi ini pegawai UPTD TBRS hanya melakukan kegiatan bersih-bersih dan jaga malam. Kegiatan ini memang memberikan dampak positif namun dirasa kurang produktif dan kurang melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi pengelolaan dan pemberian pelayanan kegiatan Taman Budaya Raden Saleh.

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kinerja Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang).**

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana kinerja UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang di masa pandemi, selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang)?
- 1.1.2 Apa saja faktor pendorong dan penghambat kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang).
- 1.3.2 Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memperluas pemahaman terkait kinerja organisasi di masa pandemi COVID-19 dan memberi kontribusi ide dan menggunakannya sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Penulis

Memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan tentang kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang).

b. Pemerintah Kota Semarang

Menjadikan bahan pertimbangan dan saran bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah dan membuat strategi pengembangan terkait kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang).

c. Universitas

Memberi data dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terkait kinerja organisasi di masa pandemi COVID-19.

d. Masyarakat

Memberi masyarakat pemahaman dan informasi tentang kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang).

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu yang dipakai penulis, sesuai atau terkait dengan fokus penelitian dan juga sebagai tambahan referensi teori-teori yang akan digunakan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh).

Tabel 1.9

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Tujuan	Hasil
1	Istiyani, Dr. AP. Tri Yuningsih, M.Si (2019)	Analisis Kinerja Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (Studi Kasus di UPTD Obyek Wisata Candi Gedongsong)	Metode penelitan kualitatif	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja organisasi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja organisasi	Kualitas layanan di UPTD Obyek Wisata Candi Gedongsong belum optimal, terutama pada sarana prasarana, prosedur layanan, dan keamanan. Responsivitas dan responsibilitas

				UPTD obyek wisata Candi Gedongsongo	pihak UPTD juga belum optimal, namun aspek akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi sudah optimal. Faktor pendukung kinerja organisasi UPTD yaitu teknologi dan faktor penghambatnya yaitu kepemimpinan dan faktor sistem
2	Deni Triyanto (2017)	Analisis Kinerja Organisasi Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang)	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Untuk menganalisis kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan pelayanan prima.	Kinerja BPPT Kota Semarang sudah cukup baik dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat karena dari lima dimensi kinerja, tiga diantaranya sudah berjalan baik yaitu dimensi produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Aspek responsivitas sudah dilaksanakan cukup baik namun terhambat karena informasi <i>website</i> BPPT

					yang belum optimal, selain itu dimensi kualitas layanan belum cukup baik karena pelayanan perijinan tidak tepat waktu, proses pelayanan masih panjang, dan sarana prasarana yang kurang memadai
3	Syaidatul Nugrahini, Herbasuki Nurcahyanto (2016)	Analisis Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Untuk menganalisis kinerja Badan Kesbangpol Kota Semarang dan mengetahui faktor kinerja Badan Kesbangpol Kota Semarang	Produktivitas Badan Kesbangpol Kota Semarang belum tercapai dengan baik, keterbatasan dana dari APBD dan SDM yang masih kesulitan memanfaatkan sarana prasarana. Standar sistem pelayanan sudah diturunkan namun masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan masih ada permainan uang dalam pelayanan. Responsivitas dan akuntabilitas sudah cukup baik namun Badan Kesbangpol

					belum memiliki <i>website</i> yang dapat memudahkan masyarakat mencari informasi secara <i>online</i> . Faktor kinerja organisasi Badan Kesbangpol Kota Semarang diantaranya SDM, budaya organisasi, dan kepemimpinan
4	Anggi Samuel, Dra. Dewi Rostyani Ngsih, M.Si (2019)	Analisis Kinerja Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Semarang	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Untuk menggali informasi tentang kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam Pengembangan dan Pengelolaan serta faktor pendorong dan penghambat kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang masih belum maksimal karena dari indikator produktivitas masih terkendala dalam hal pelestarian dan pengelolaan objek wisata dan kurang maksimal dalam mempromosikan pariwisata. Kualitas layanan juga kurang optimal karena kurangnya kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan dan responsivitas Dinas Pariwisata Kabupaten

					Semarang belum terlaksananya sistem pengaduan untuk masyarakat dalam memberikan kritik dan saran. Faktor pendorong kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yaitu kepemimpinan, tim, dan teknologi sedangkan faktor penghambatnya yaitu SDM, sistem, partisipasi masyarakat, dana sarana prasarana
5	Pria Bintang Aditama, Nina Widowati (2017)	Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui faktor penghambat kinerja organisasi di Kantor Kecamatan Blora	Kinerja organisasi Kantor Kecamatan Blora masih belum optimal dilihat dari aspek produktivitas dan penggunaan sumber daya. Meskipun keempat aspek lainnya sudah baik namun masih ada faktor penghambat seperti fasilitas sarana dan

					prasarana dan SDM
6	Agatha Debby Reiza Macella (2020)	Kinerja Organisasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Johan Pahlawan	Dari lima indikator yang disebutkan yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas telah dijalankan cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala dan kurang maksimal. Perkembangan teknologi, kondisi pegawai, dan sarana prasana menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Kecamatan Johan Pahlawan
7	Dwi Eki Liansyah, Maesarah (2018)	Analisis Kinerja Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif	Untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang menghambat kinerja organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Dari kelima aspek masih ada 4 aspek yang belum optimal yaitu aspek produktivitas, tanggung jawab, responsivitas, dan akuntabilitas. Sedangkan aspek kualitas layanan sudah berjalan baik. Faktor yang menghambat kinerja organisasi KPID

					Jateng yaitu kualitas SDM dan sarana prasarana yang belum optimal
8	Armila Ernisa Zulfa, Ida Hayu Dwimawanti (2018)	Analisis Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal	Metode penelitian kualitatif	Untuk menganalisis kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal	Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda sudah baik, terlihat dari kualitas pelayanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Namun aspek responsivitas masih belum optimal. Teknologi, budaya organisasi, dan kepemimpinan menjadi faktor pendukung kinerja, sedangkan faktor penghambatnya yaitu sarana, SDM, teknologi, politik, dan faktor sosial.
9	Mega Rorong (2020)	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Ratahan Kabupaten	Metode penelitian kualitatif	Untuk mengkaji kinerja pemerintah Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara terkait pelayanan publik khususnya di	Dari segi efisiensi, kinerja pelayanan publik kantor Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara selama pandemi Covid 19 kurang bagus.

		Minahasa Tenggara		masa pandemi Covid 19.	Dalam hal prosedur pelayanan Kantor Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara masih banyak kekurangan terutama dari segi waktu dan tata krama dalam manajemen dan administrasi. Pada saat yang sama, dalam hal daya tanggap, atas setiap pengaduan masyarakat sudah baik, tetapi dalam prosesnya/kecepatan masih dikeluhkan masyarakat.
10	Cindy Greace Seran, Alden Laloma, Very Y. Londa (2021)	Kinerja Guru Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di SD Inpres Tateli Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)	Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif	Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru sekolah dasar Inpres Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa di masa pandemic COVID-19.	Kualitas hasil kerja guru, ketepatan waktu guru di masa pandemi, dan komunikasi guru dinilai kurang baik. Namun inisiatif guru dalam mengajar dan kemampuan guru dalam menguasai materi sudah cukup baik

Sumber: data diolah dari berbagai jurnal

Berdasarkan tabel 1.9 dapat dilihat bahwa telah dilakukan penelitian tentang kinerja sebuah organisasi. Seluruh penelitian terdahulu yang tercantum pada tabel 1.9 menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis kinerja organisasi, mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat kinerja organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kinerja tenaga pendidik di suatu organisasi. Lokus di dalam penelitian terdahulu terdapat di organisasi publik baik di dinas provinsi, dinas kota, maupun unit pelaksana tekni daerah. Selain itu penelitian juga telah dilakukan di organisasi Komisi Penyiaran Indonesia, kecamatan, dan organisasi tenaga pendidik (guru). Kesimpulan dari penelitian terdahulu mengatakan bahwa masih terdapat beberapa indikator atau aspek yang belum terpenuhi dan belum maksimal dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Aspek yang belum maksimal ini disebabkan oleh adanya penghambat dalam kinerja sebuah organisasi. Penelitian terdahulu menggunakan beberapa teori terkait indikator sebagai pengukuran kinerja sebuah organisasi. Indikator yang digunakan oleh masing-masing peneliti berbeda-beda.

Melihat dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang terkait kinerja organisasi di UPTD Taman Budaya Raden Saleh. UPTD Taman Budaya Raden Saleh digunakan sebagai lokus penelitian karena peneliti melihat ada sebuah permasalahan yang terjadi terkait kinerja UPTD Taman Budaya Raden Saleh. Penelitian ini juga mengaitkan antara kinerja organisasi dengan situasi pandemi COVID-19. Kebaruan dari penelitian ini

adalah lokus penelitian yang berada di UPTD Taman Budaya Raden Saleh dan kaitan antara kinerja organisasi (UPTD TBRS) dengan pandemi COVID-19. Maka dari itu penelitian ini menganalisis bagaimana kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di masa pandemi covid-19 studi kasus pada UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut para ahli, administrasi publik memiliki pengertian sebagai berikut:

1. *Nicholas Henry* dalam Rahman (2017:19)

Administrasi publik adalah perpaduan antara teori dan pelaksanaan proses manajemen guna memperoleh nilai normatif dari masyarakat. Administrasi publik mencoba melembagakan praktik manajemen untuk lebih beradaptasi dengan efektivitas, efisiensi dan kepuasan kebutuhan sosial.

2. *Hughes* dalam Revida dkk (2020:3)

Administrasi publik adalah kegiatan yang melayani publik atau kegiatan pelayanan publik serta digunakan untuk melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain.

3. Harbani Pasolog (2010:8)

Administrasi publik merupakan wujud kerjasama dari serangkaian pihak, baik personal, komunitas, lembaga, organisasi, dan lain-lain, dalam melakukan tugas pemerintahan demi mencukupi kebutuhan publik secara efektif dan efisien

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik yang berkembang secara umum, yaitu:

1. *Old Public Administration* (OPA)

Paradigma OPA memiliki kaitan yang erat dengan tiga gagasan, yaitu konsep dikotomi politik-administrasi, model rasional oleh Herbert Simon dan konsep pilihan publik (*public choice*). Paradigma OPA merupakan paradigma pertama yang disampaikan oleh *Woodrow Wilson* (1887) memiliki dua pemahaman, yang pertama yaitu konsep politik dan administrasi terdapat perbedaan yang jelas. Perbedaan tersebut terkait dengan sistem akuntabilitas yang harus menjadi tanggung jawab pejabat terpilih dan netralitas pengelola. Kedua, terdapat atensi akan pembentukan struktur dan strategi manajemen administrasi, dan pemberian hak kepada organisasi publik dan manajernya supaya melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien (Thoha, 2008). Paradigma OPA ini menimbulkan konsep model rasional yang dikatakan oleh *Herbert Simon* (1957) dimana rasionalitas mempengaruhi manusia untuk mengambil tindakan guna mencapai tujuan. Manusia tersebut sering disebut administrator, yaitu orang yang berperilaku logis demi mewujudkan tujuan organisasi dan pribadi. Selain konsep rasional model, OPA juga menimbulkan konsep tentang *public choice* (pilihan publik). Konsep ini menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang logis dan ingin memenuhi kepentingan pribadinya (*self- interested*) serta

menggunakan secara penuh keuntungan pribadinya (*own-utilities*) (Imanuel Jaya, 2014).

2. *New Public Management* (NPM)

Fokus utama dalam NPM yaitu penggunaan mekanisme dan terminologi pasar di sektor publik. Artinya pemerintah dengan masyarakat dalam menjalin hubungan tidak lagi bertumpu pada otoritas resmi, tetapi menjadi berorientasi pasar dan persaingan melawan persaingan yang sehat. Dalam konsep ini, semua pimpinan didorong untuk meningkatkan produktivitas, mencari cara lain, dan mencari inovasi untuk mencapai hasil yang maksimal atau memprivatisasi fungsi pemerintahan (Thoha, 2008).

Dengan konsep ini maka *Christopher Hood* dalam Thoha (2008:75) mengatakan bahwa Metode telah berubah, model sistem resmi publik tidak lagi diterapkan dan menjadi model bisnis swasta dan pengembangan pasar, dan legalitas organisasi publik tidak lagi diterapkan untuk menghindari keleluasaan administratif..

3. *New Public Service* (NPS)

Paradigma NPS ini lebih menekankan berbagai elemen. Meskipun begitu *New Public Service* memiliki normatif model yang dapat dibedakan dengan paradigma sebelumnya. Ide dasar dari paradigma ini adalah teori kewarganegaraan demokratis, model komunitas dan masyarakat sipil, humanisme organisasi, dan ilmu administrasi publik post-modern. Keempat konsep tersebut merupakan

pengembangan ilmu administrasi publik dalam paradigma NPS (Thoha,2008).

4. *Good Governance*

Menurut Sadjijono (2007:203), *good governance* adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam norma yang berlaku saat ini untuk mencapai cita-cita bangsa. Sedangkan IAN&BPKP (2000:5) mengemukakan bahwa *good governance* merupakan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Menurut UNDP *good governance* artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna atau sesuai dengan prinsip dasar *good governance* (Maryam, 2016). Prinsip *good governance* menurut UNDP ada 14, yaitu berpandangan pada masa depan, tidak tertutup dan jelas, mengikutsertakan masyarakat, bertanggung jawab, menegakkan hukum pada posisi teratas, demokrasi, berkompeten, berdaya tanggap, efisien dan efektif, pelimpahan kekuasaan berada di pemerintahan daerah, bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, mengurangi kesenjangan, memperhatikan lingkungan hidup, dan berkomitmen adil pada pasar usaha.

1.5.4 Konsentrasi Administrasi Publik

1.5.4.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsentrasi dari administrasi publik. Kebijakan adalah ketetapan prinsi-prinsip guna mengendalikan upaya tindakan yang dikerjakan sesuai rancangan dan tidak berubah-ubah guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Edi Suharto dalam Sore, 2017:3). Menurut Keban dalam Tahir (2014:20), kebijakan publik dapat dipandang dari teori filosofis yaitu berupa suatu hasil, proses, dan kerangka kerja. Kebijakan publik berkaitan dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan maupun diabaikan (Dye dalam Sore, 2017:34).

1.5.4.2 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan salah satu cabang dari *New Public Management* yang membahas tentang desain rencana dan reorganisasi, pengalokasian sumber daya menggunakan metode anggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi dan audit rencana. (Ott, Hyde dalam Wijaya, 2014:6). Teori manajemen yang dikemukakan Taylor (1911) dalam karyanya "*The Principle of Scientific Management*" menyebutkan bahwa prinsip manajemen publik adalah mengukur metode kerja, meliputi dampak kerja, metode pemilihan pekerja, pendistribusian kerja, dan lain-lain, agar lebih produktif dan kerjasama antar pekerja meningkat guna mewujudkan tujuan organisasi (Federickson & Smith dalam Wijaya, 2014:6)

Doktrin manajemen publik menyarankan untuk “*Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector from schoolhouse to statehouse city hall to the pentagon*” (Osborn & Gaebler, 1992). Doktrin ini lebih mendekati kaidah dalam praktik administrasi publik, sehingga doktrin ini disebut New Public Management (NPM). Dalam konsep manajemen publik, hubungan antara birokrasi dan birokrat dapat diperluas untuk menemukan bentuk hubungan terbaik antara pemimpin politik dan birokrasi. (Wijaya, 2014:11). Manajemen publik atau dalam paradigma administrasi publik disebut New Public Management (NPM) mempunyai tujuh komponen dasar, diantaranya:

1. Profesionalisme di organisasi publik
2. Diterapkannya standar kinerja dan standar pengukuran kinerja
3. Selalu memperhatikan pengelolaan keluaran dan hasil
4. Rincian unit kerja di sektor publik
5. Membangun persaingan di sektor publik
6. Mengintegrasikan metode pengelolaan bidang komersial yang mencakup sektor publik
7. Penekanan terhadap penggunaan sumber daya

1.5.5 Kinerja

Dalam melaksanakan pelayanan publik, sebuah organisasi harus memiliki kinerja yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Menurut Moeheriono (2012:95) kinerja merupakan kegiatan pencapaian tujuan, sasaran, visi, dan misi dengan memeriksa tingkat pelaksanaan

program sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Kinerja atau *performance* merupakan tingkat pencapaian tujuan (Keban dalam Harbani Pasolog, 2010:197). Menurut Bernardin dan Russel dalam Zulfa (2018: 4) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari partisipasi seluruh anggota organisasi demi mencapai tujuan organisasi.

1.5.5.1 Level Kinerja

Berkaitan dengan konsep kinerja di atas, Rummler dan Brache dalam (Sudarmanto, 2009:7-8) mengatakan terdapat tiga level kinerja, yaitu :

1. Kinerja Organisasi

Tercapainya hasil kinerja dari organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan tujuan, rencana, dan manajemen organisasi.

2. Kinerja Proses

Hasil dari suatu barang maupun pelayanan merupakan tahapan proses dalam kinerja sebuah organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, rancangan, dan keseluruhan proses kerja organisasi.

3. Kinerja Individu

Tercapainya hasil dari pegawai atau individu akibat pengaruh untuk mencapai tujuan, perancangan kerja, manajemen kerja, dan karakter masing-masing individu.

1.5.6 Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan tercapainya seluruh kegiatan organisasi untuk mencukupi kebutuhan organisasi sesuai dengan sistem dan

kemampuan organisasi (Atmosudirjo dalam Pasolog, 2010:198). Menurut Amitai Etzioni dalam Keban (2008:227) kinerja organisasi menjelaskan kemampuan organisasi demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Nasucha dalam Pasolog (2010:198) mengatakan bahwa kinerja organisasi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan organisasi secara efektif dari setiap kelompok maupun individu yang terlibat dalam organisasi dengan meningkatkan sistem dan kemampuan organisasi secara berkelanjutan. Sebuah organisasi dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila telah memenuhi aspek-aspek atau indikator yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Indikator kinerja yang dimaksud ialah bentuk kuantitatif dan kualitatif suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan akhir dengan memperhitungkan masukan (*input*), keluaran (*ouput*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) (LAN-RI dalam Pasolog, 2010: 202).

1.5.6.1 Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja adalah evaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi tugas dan kewajibannya. Jika dikaitkan dengan organisasi, maka penilaian kinerja organisasi adalah evaluasi atas berhasil tidaknya organisasi dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Dwiyanto (2006:47) mengatakan penilaian kinerja adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi guna mencapai tujuannya. Bagi organisasi publik, evaluasi kinerja semacam ini dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana layanan yang diberikan oleh organisasi dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Keban (2008:109) penilaian kinerja perlu dilihat melalui usaha yang telah dilakukan di instansi pelayanan publik. Selain itu penilaian kinerja berguna untuk memahami kekurangan dan keunggulan organisasi, faktor kendala dan dukungan organisasi, serta keberhasilan kinerja sebuah organisasi maupun pegawai.

Untuk memudahkan proses penilaian kinerja suatu organisasi, maka dapat menggunakan beberapa indikator yang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi. Menurut LAN-RI (1999:7) indikator kinerja merupakan bentuk kuantitatif dan kualitatif suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan akhir dengan memperhitungkan masukan (*input*), keluaran (*ouput*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Menurut Agus Dwiyanto dalam Harbani Pasolog (2010 : 203-204) terdapat lima indikator kinerja yang dipakai guna mengukur kineja organisasi publik, yaitu:

1. Produktivitas

Pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dengan melihat keberhasilan suatu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Tingginya pengaruh kualitas layanan terhadap keberhasilan kinerja organisasi publik menjadikan indikator ini digunakan dengan

melihat kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan oleh suatu organisasi.

3. Responsivitas

Kapabilitas birokrasi dalam mengetahui kebutuhan masyarakat yang diikuti penyusunan dan pembangunan agenda prioritas pelayanan yang menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

4. Responsibilitas

Kesesuaian keberlangsungan program organisasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan birokrasi secara eksplisit ataupun implisit.

5. Akuntabilitas

Birokrat publik yang telah dipilih masyarakat harus tunduk dan mengutamakan kepentingan publik sesuai dengan kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang telah ditetapkan.

Kumorotomo dalam Harbani Pasolog (2010 : 204-205) terdapat empat indikator untuk menilai kinerja organisasi publik yaitu:

1. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kesuksesan organisasi publik untuk mendapat keuntungan dan menggunakan faktor produksi serta mempertimbangkan rasionalitas ekonomis.

2. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan tercapainya tujuan yang didirikan organisasi publik dilihat dari kerasionalan, sistem, rasionalitas, teknis, mutu, tujuan, misi, dan peran agen pembangunan.

3. Keadilan

Penyaluran dan pengalokasian pelayanan publik yang diberikan organisasi publik.

4. Daya Tanggap

Daya tanggap organisasi publik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Selim dan Woodward dalam Harbani Pasolog, (2010:207-208) mengatakan bahwa kinerja organisasi publik bisa diketahui dengan empat indikator yaitu:

1. Pelayanan

Pelayanan publik yang diberikan oleh suatu organisasi.

2. Ekonomi

Pengeluaran biaya diharapkan lebih sedikit daripada yang sudah direncanakan.

3. Efisiensi

Memperlihatkan hasil yang didapatkan dengan pengeluaran organisasi.

4. Efektivitas

Memperlihatkan hasil yang dicapai dan hasil yang seharusnya dicapai.

5. *Equity*

Memperlihatkan suatu keadilan dari kebijakan yang diperoleh.

Selanjutnya menurut Jerry Harbour dalam Sudarmanto (2009:13) kinerja organisasi dapat diukur dengan enam indikator yaitu:

1. Produktivitas

Kecakapan organisasi untuk mewujudkan hasil barang maupun jasa.

2. Kualitas

Kualitas produksi barang dan pelayanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi harus memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

3. Ketepatan Waktu (*Timelines*)

Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan hasil produk dan pelayanan.

4. Putaran Waktu

Waktu yang diperlukan dalam prosedur peralihan produk dan pelayanan untuk konsumen.

5. Penggunaan Sumber Daya

Suatu produk maupun pelayanan yang dihasilkan dari sumber daya yang tersedia.

6. Biaya

Biaya atau jumlah dana yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa.

1.5.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi dalam sektor publik tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja tersebut. Berikut ini merupakan faktor-faktor kinerja organisasi menurut Ruky dalam Tangkilisan (2005:180), diantaranya:

1. Teknologi

Cara dan perangkat kerja organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Peningkatan kualitas teknologi akan diikuti dengan peningkatan kinerja organisasi.

2. Kualitas masukan atau *input* yang dipakai organisasi.

3. Kualitas lingkungan fisik

Mencakup keselamatan kerja, kebersihan, dan penataan ruangan.

4. Budaya organisasi

Mencakup model kerja dan tingkah laku di dalam organisasi.

5. Kepemimpinan

Usaha pengendalian sekelompok orang dalam organisasi supaya dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan standar kerja.

6. Pengelolaan sumber daya manusia

Dilihat dari segi kompensasi, upah, kenaikan pangkat dan lainnya.

Menurut *Keith Davis* dalam Mangkunegara (2006:13), faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi yaitu:

1. Faktor Kemampuan (*Ability*)

Secara psikologis, kemampuan mencakup kemampuan IQ potensial dan pengetahuan nyata ditambah kemampuan keterampilan. Artinya, pemimpin dan karyawan dengan IQ tinggi, sangat berprestasi, jenius dan berbakat harus memiliki pendidikan jabatan yang memadai dan mahir menjalankan tugas sehari-hari, serta mudah menghasilkan kinerja yang optimal.

2. Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi merupakan tingkah laku pimpinan dan pegawai dalam organisasi. Semangat kerja dapat dilihat dari tingkah laku dari setiap anggota organisasi, tingkah laku tersebut dapat positif maupun negatif sesuai dengan kondisi tertentu. Kondisi ini berhubungan dengan relasi kerja, sarana prasarana kerja, suasana kerja, dan metode kepemimpinan.

Soesilo dalam Indriyani (2016:44), bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi yaitu:

1. Tata organisasi yang kaitannya dengan hubungan di dalam organisasi seperti peran penyelenggara kegiatan organisasi.
2. Kebijakan manajemen yaitu visi dan misi organisasi.

3. Sumber daya manusia, kaitannya dengan kualitas kerja pegawai dan iklim kerja.
4. Sistem informasi manajemen, berkaitan dengan cara mengelola basis data.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta teknologi untuk menjalankan program organisasi.

1.5.8 Covid-19

Menurut situs *World Health Organization (WHO)*, virus korona merupakan virus yang dapat mengakibatkan penyakit pada hewan maupun manusia. Virus korona ini dapat menyerang manusia melalui saluran pernapasan dan mengakibatkan infeksi seperti flu dan penyakit serius yaitu *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Varian baru virus korona diketahui pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Varian baru ini kemudian dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)* dan menyebabkan Penyakit *Coronavirus 2019 (COVID-19)*. Penyebab COVID-19 ialah virus SARS-COV2 yang termasuk varietas yang sama dengan virus korona. Gejala COVID-19 mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dari COVID-19 (kurang dari 5%), akan tetapi jumlah kasus COVID-19 lebih tinggi daripada SARS. Penyebaran COVID-19 ini juga lebih cepat dibandingkan SARS.

Gejala seseorang yang terpapar COVID-19 dapat berupa pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. COVID-19 di Indonesia menjadi pandemi

yang belum berakhir sampai saat ini. Jumlah angka kematian masih sangat rendah sekitar 3%, namun jika dihitung per jiwa maka sudah ada satu juta lebih jiwa yang terpapar COVID-19. Penyakit ini lebih mudah menyerang orang lanjut usia dan orang yang sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Dilihat dari situasi saat ini, angka kesembuhan akan terus meningkat (Kementerian Kesehatan, 2021).

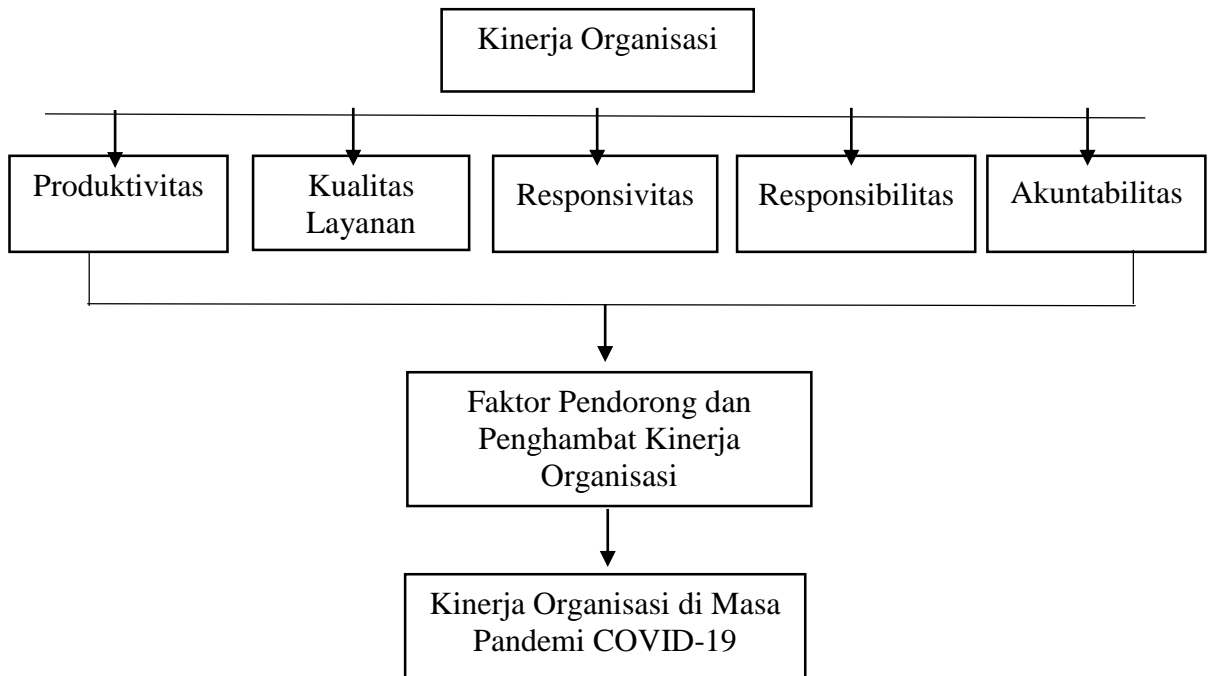
1.5.9 Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka pemikiran menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2009:91) mengatakan bahwa kerangka berpikir ialah bentuk konseptual tentang hubungan teori dan faktor yang telah ditetapkan sebagai masalah dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pikir untuk menganalisis kinerja organisasi UPTD TBRS di masa pandemi COVID-19, dengan menggunakan teori Agus Dwiyanto (2006) tentang indikator penilaian kinerja.

Bagan 1.1

Kerangka Pikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Kinerja organisasi merupakan upaya yang dilakukan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Peneliti akan melihat sejauh mana sebuah organisasi yaitu UPTD Taman Budaya Raden Saleh dapat mencapai visi, misi, dan tujuannya di masa pandemi COVID-19. Untuk mengetahui kinerja organisasi UPTD TBRS, peneliti menggunakan penilaian kinerja organisasi dengan melihat apakah UPTD TBRS berhasil atau tidak berhasil dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Peneliti menggunakan 5 aspek penilaian kinerja untuk UPTD TBRS, aspek tersebut diantaranya:

1. Produktivitas

Efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan UPTD TBRS. Tujuannya untuk mengetahui keberhasilan pelayanan publik yang diberikan dengan yang diharapkan. Aspek ini berkaitan dengan target kunjungan wisatawan, target pendapatan, efisiensi penggunaan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia di UPTD TBRS.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja organisasi publik. Masyarakat ini artinya pengunjung TBRS, pemilik kios, maupun penyewa gedung di dalam TBRS. Aspek ini berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana, standar prosedur pelayanan, keramahan dan kesopanan pegawai, serta keamanan di dalam TBRS.

3. Responsivitas

UPTD TBRS diharapkan dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun dan mengembangkan program yang sudah ada, dan mendengarkan aspirasi atau pendapat masyarakat. Tujuan aspek ini untuk mengetahui keselarasan program dan kegiatan dengan pelayanan kebutuhan masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menanggapi kebutuhan pengunjung dan pemilik kios, ketersediaan wadah untuk pengaduan dan respon yang diberikan.

4. Responsibilitas

Responsibilitas akan melihat apakah penyelenggaraan aktivitas UPTD TBRS sesuai dengan peraturan dan prosedur penyelenggaraan teknis yang telah ditentukan. Aspek ini berkaitan dengan kesesuaian penetapan tarif retribusi kios dan penyewaan gedung di Taman Budaya Raden Saleh

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas akan melihat pertanggungjawaban pihak UPTD TBRS dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan, dan transparansi seluruh aktivitas pelayanan yang berpihak pada masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi dalam mencapai target dan ketepatan laporan yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Setelah mengetahui aspek penilaian kinerja organisasi yang akan digunakan, selanjutnya peneliti akan menggunakan konsep faktor pendorong

dan penghambat kinerja organisasi UPTD TBRS pada masa pandemi COVID-

19. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kualitas lingkungan fisik

Faktor ini digunakan untuk menganalisis bagaimana lingkungan fisik di dalam TBRS. Lingkungan fisik mencakup keamanan kerja, sarana dan prasarana, kebersihan, dan penataan ruangan.

2. Budaya organisasi

Faktor ini digunakan untuk menganalisis sikap dan situasi kerja para pegawai di dalam UPTD TBRS.

3. Kepemimpinan

Faktor ini digunakan untuk menganalisis usaha pengendalian anggota UPTD TBRS supaya memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Pengelolaan sumber daya manusia

Faktor ini digunakan untuk menganalisis pengelolaan SDM di UPTD TBRS, seperti aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya.

1.7 Argumen Penelitian

Kinerja organisasi UPTD TBRS pada masa pandemi mengalami penurunan kinerja yang dapat dilihat dari jumlah pendapatan retribusi, jumlah kunjungan wisata, serta jumlah kegiatan yang diadakan di TBRS. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan di Kota Semarang, salah satunya kegiatan pariwisata. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait kinerja organisasi UPTD TBRS di masa pandemi COVID-19.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah salah satu cabang ilmu yang mendiskusikan atau mempertanyakan sampai bagaimana penelitian dilakukan dengan menyiapkan laporan berdasarkan fakta atau fenomena ilmiah.

1.8.1 Desain Penelitian

Peneliti memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh dan mendeskripsikan gambaran rinci tentang objek penelitian atau keadaan objek penelitian tersebut. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kualitatif membawa masalah yang kompleks dan dinamis yang bersifat sementara dan terus berkembang atau berganti setelah melaksanakan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan meneliti kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat masa pandemi COVID-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang) serta menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs riset ini terletak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tepatnya pada UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang. Taman Budaya Raden Saleh terletak di jalan Sriwijaya no. 29 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada kinerja UPTD TBRS di masa pandemi COVID-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. UPTD Taman Budaya Raden Saleh adalah bagian dari kelima UPTD yang menjadi pelaksana teknis pada bidang pariwisata di bawah kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
2. UPTD Taman Budaya Raden Saleh merupakan satu-satunya UPTD di bawah kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang memiliki daya tarik sebagai wisata budaya dan sebagai pusat kesenian serta kebudayaan yang menawarkan wisata budaya dengan menampilkan pertunjukan wayang, pertunjukan teater, pertunjukan musik, hingga pameran seni lukis.
3. Kinerja UPTD TBRS mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 dilihat dari penurunan pendapatan retribusi kios, pendapatan retribusi sewa gedung, dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya Raden Saleh.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memakai teknik *purposive sampling* atau memilih informan secara sengaja dengan pertimbangan informan ialah orang yang dapat memberikan informasi yang nyata dan dapat dipercaya. Selanjutnya, informan dari penelitian ini antar lain:

1. Kepala UPTD TBRS , sebagai pimpinan di UPTD TBRS.
2. Pegawai di UPTD TBRS (2) , Bendahara dan pegawai UPTD TBRS yang mengetahui jumlah pendapatan dan jumlah pengunjung di UPTD TBRS.

3. Pemilik Kios di dalam TBRS (1), sebagai sumber pendapatan retribusi UPTD TBRS.
4. Pengunjung TBRS/ masyarakat sekitar, pengunjung TBRS yang ada saat dilakukan wawancara .

1.8.4 Jenis Data

Peneliti memilih menggunakan jenis data kualitatif. Menurut Lofland dalam Moleong (2009:12) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data primer ialah berupa kalimat maupun suatu aktivitas, serta adanya data pendukung seperti arsip dan lain sebagainya. Peneliti mengumpulkan data melalui tulisan, gambar, dan bukan angka. Jika terdapat angka, itu sekadar untuk penunjang. Data tersebut untuk mengetahui bagaimana kinerja UPTD TBRS di masa pandemi dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat kinerja UPTD TBRS di masa pandemi COVID-19.

1.8.5 Sumber Data

Data diperoleh dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, ialah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama melalui wawancara terhadap para informan dan observasi secara langsung di lapangan. Data sekunder, didapat secara tidak langsung seperti dokumen terkait penelitian dan studi pustaka.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya peneliti guna memperoleh kelengkapan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti menitikberatkan pada tiga metode pengumpulan data yaitu menggunakan:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2009:186) wawancara yakni pembicaraan oleh dua orang dengan tujuan tertentu. Wawancara ini dilaksanakan oleh pewawancara yang memberikan pertanyaan dengan narasumber yang memberikan jawaban. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan bebas namun terarah dan masih sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Observasi (Pengamatan)

Menurut Moleong (2009:187) observasi merupakan peninjauan yang dilaksanakan dengan sengaja, sistematis, terkait gejala sosial dan gejala psikis yang selanjutnya dilaksanakan pencatatan. Peneliti mencatat seluruh peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan penelitian dengan melihat langsung dan memahami situasi yang sedang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah informasi yang didapatkan dari berbagai arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen ini dapat berupa tulisan dan foto.

1.8.7 Analisis Dan Intepretasi Data

Proses analisis data dalam penelitian dibagi menjadi tiga menurut model Miles dan Huberman dalam Prastowo (2012:242), yaitu:

1. Reduksi data

Rangkaian pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data di lapangan. Peneliti mengumpulkan informasi secara langsung dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisa sesuai dengan tema penelitian kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat masa pandemi COVID-19 (Studi Kasus UPTD Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang)

2. Penyajian data

Tahap ini adalah tahap lanjutan dari reduksi data, dimana data yang sudah dirangkum akan dikembangkan kembali menjadi deskripsi informasi yang sistematis untuk dijadikan kesimpulan dan mengambil keputusan. Data tersebut disampaikan dengan bentuk teks naratif.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti menyajikan data yang sudah dikembangkan dan disampaikan dengan bentuk teks naratif, lalu peneliti harus menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disampaikan berbentuk penemuan baru yang belum pernah ditemukan pada penelitian terdahulu.

1.8.8 Kualitas Data

Metode pengujian kualitas data yang digunakan merupakan metode triangulasi yaitu metode pengecekan data yang bertujuan guna mengetahui apakah peneliti benar-benar memahami proses dan hasil yang diperoleh berdasarkan informasi dari informan. Menurut Sutopo (2006), dalam penelitian kualitatif, metode triangulasi merupakan metode umum yang kerap kali digunakan untuk meningkatkan validitas data. Maka dari itu, metode triangulasi memiliki empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber (*data triangulation*), (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Sifat multiperspektif diterapkan pada metode triangulasi sebagai dasar pola pikir fenomenologi. Artinya, dalam penarikan kesimpulan diperlukan lebih dari satu sudut pandang. Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber, dimana dalam pengambilan data, peneliti menggunakan berbagai sumber data yang sama atau sejenis agar kebenaran suatu data lebih terpercaya jika diambil dari beberapa sumber data yang berbeda. Metode triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara komprehensif dengan informan.
2. Pengujian silang antara fakta yang diterima dari informan dengan fakta di lapangan.
3. Pembuktian fakta yang diterima untuk informan dan pihak lain.